



Konsepsi Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah PUPR: Meninjau Terkait Administrative Burden

Raphael Bertrand Mayaka¹, Desty Puspita Maharani²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Received: 08 Juni 2024

Revised: 15 Juni 2024

Accepted: 22 Juni 2024

The large number of damaged roads and flooding in Central Java province has caused many complaints from residents of Central Java province to the government, coupled with the unpredictable extreme weather which has resulted in the repair and maintenance of this infrastructure, it is necessary to study further what efforts will be made by the government to handle and prevent incidents. similar in the future. This research was carried out using qualitative research methods which were carried out using interviews to examine the condition of natural objects. Due to these various conditions, the government continues to carry out repairs and maintenance of infrastructure by conducting environmental studies and outreach to the public because control requires the pentahelix concept which involves the government, society, the business world (entities or business actors), the media and academics.

Keywords: *Floods, Infrastructure, Damaged Roads, Central Java, Government efforts.*

(*) Corresponding Author: raphaelbm@students.unnes.ac.id;

How to Cite: Mayaka, R. B., & Maharani, D. P. (2024). Konsepsi Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah PUPR: Meninjau Terkait Administrative Burden. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12574820>.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, dalam mencanangkan segala upaya demi kesatuan hidup hingga kesejahteraan masyarakat; terkhusus kepada serangkaian wilayah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah telah menggaungkan berbagai Tugas Pokok dan Fungsi demi terciptanya damai yang ideal. Setara dengan cita-cita Bangsa, bahwasanya demi meraih citra keadilan yang menyeluruh, pun kehidupan bahagia yang abadi. Dengan itu, berlandaskan atas teori Hukum Administratif mengenai segala wujud beban yang sepatutnya dihindari dan dicermati. Supaya fungsi daripada Pemerintah itu patut dan sesuai akan masyarakat yang bersahaja. Demikian olehnya, terdahulu mengupas terkait berbagai suatu beban itu, sebagai suatu landasan teori untuk menilai konsepsi yang diracik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berawal dengan suatu istilah *Learning Cost*, sebagaimana mestinya masyarakat yang dituju supaya mudah dalam mengakses informasi guna mendalami peran Pemerintah kepada lingkungan hidupnya. Suatu beban itu, terlahir daripada rasio sulit atau mudahnya memperoleh suatu informasi yang disuguhi oleh Pemerintah. Terkait dengan segala hal yang meliputi masyarakat, dalam ide ini merupakan Tata Ruang untuk hidupnya. Mengutip tanya, apakah ada layanan yang memadai nantinya; baik kualitas maupun kuantitas; hingga segala persyaratan yang nantinya harus dipenuhi guna meraih keuntungan itu. Kemudian, *Psychological Cost* yang menitikberatkan



stigma, ataupun partisipasi masyarakat demi menyalur sukses akan suatu kebijakan Pemerintah. Tanpa adanya perhatian untuk beban ini, berisiko dengan karakteristik negatif, suatu perasa hilang akan perihal kuasa personal ataupun otonomi terhadap interaksi dengan Pemerintah itu sendiri. Bahkan, terbentuk tekanan atau frustrasi sesaat berhadapan dengan segala rangkaian proses administrasi. Terakhir, mengenai *Compliance Cost*, meliputi beban-beban materiil dalam tunduk mengikuti segala aturan administrasi dan persyaratannya. Dengan maksud, terbuangnya waktu akan alur yang kurang efektif; mengisi serta menyempurnakan segala forum ataupun berkas yang berulang kali; hingga menerbitkan dokumen-dokumen mengenai status kependudukannya. Selain mengkonseptualisasikan beban administratif, kerangka kerja ini memetakan cara-cara politik berhubungan dengan beban dan mengidentifikasi peran yang dapat dimainkan oleh aktor-aktor non-negara dalam menyangga atau memperkuat efek beban (Herd & Moynihan, 2018).

Pemerintah sebagai suatu birokrasi, tak luput terhindar dari segala persepsi ataupun penilaian buruk oleh masyarakat. Merekalah saksi atas Tugas Pokok dan Fungsinya, hingga acapkali tak dianggap sempurna atas segala laporan hingga protes yang dilayangkan kepadanya. Dengan titik berat, bahwasanya Pemerintah seharusnya dapat lebih memperhatikan laju beban administratif dalam segala proyek yang diusung di kemudian hari. Dimulai dengan pengenalan yang terpadu, sosialisasi kepada masyarakat yang digelar damai pun mudah dipelajari. Kemudian tidak mengurangi rasa percaya ataupun rasa semangat batin dalam menyusun kehidupan berbahagia. Melalui segala rancangan milik Pemerintah untuk segala sisi masyarakatnya, kemudian, tidaklah perlu dalam memperumit persyaratan bagi masyarakat itu mengikuti. Harap-harap dapat berlangsung efektif, jujur, menyeluruh. Berdasarkan itikad baik itu, sehingga, segala kebijakan yang ditawarkan oleh Pemerintah dapat lebih mudah diterima olehnya. Dibentuk sebagaimana mestinya, untuk rakyatnya, demi rakyatnya yang sejahtera. Maka dari itu, diusung daripada lembar tulisan ini, bahwasanya segala beban administratif yang perlu dievaluasi dalam segala proyek milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terkhusus mengenai air dan irigasi; hingga jalanan yang memadai.

Lembaga Pemerintahan itu, bertanggungjawab kepadanya ialah PUPR Provinsi Jawa Tengah. Atas segala pengamatan yang tentu, beban-beban yang dibahas dalam tulisan ini hanyalah wajar. Mengingat suatu kebijakan, tiada satu pun yang sempurna. Dengan segala aspek yang perlu ditinjau kembali: iklim untuk air; cuaca untuk jalan; hingga perkembangan zaman untuk aturan yang melandasi. Berdasarkan berbagai hal tersebut, telah ditemukan fokus permasalahan yang dirumuskan sebagai alur penulisan ini. Tiada lain, mengenai bagaimana perilaku hingga efektivitas daripada segala proyek hingga kebijakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah PUPR terkait pertimbangannya akan seluruh bagian *Administrative Burden* yang berkaca dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

METODE

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana menurut Poerwandari, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif. (Poerwandari, 1998) Jenis penelitian ini

bertujuan untuk memperoleh pemahaman umum terhadap kenyataan sosial dari kacamata penulis. Pemahaman yang dimaksud didapatkan setelah dilakukannya analisis dari kenyataan sosial yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Bersumber dari analisis tersebut, ditariklah kesimpulan yang berisikan pemahaman umum yang bersifat abstrak mengenai kenyataan-kenyataan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana bersumberkan dari Moleong yang menyatakan bahwa jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian dengan data yang dikumpulkan bukan dalam bentuk angka melainkan berupa kata-kata ataupun gambar. (Moleong, 2007) Pada dasarnya suatu penelitian dilaksanakan guna mendapatkan suatu data. Dalam proses mendapatkan suatu data tentu juga membutuhkan metode tertentu, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara. Pengertian wawancara sendiri ialah bentuk komunikasi antar dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. (Mulyana, 2014) Kemudian dalam penelitian ini memiliki sumber data primer berupa hasil wawancara yang bersumberkan dari beberapa informan, informan-informan tersebut adalah Ibu Sri Sutrisni, S. T., M. T. dan Bapak Rizal Ristanto selaku staff dari dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah bidang RASNAWU serta Bapak Azwar Annas Kunaifi, S. T., M. T. selaku Sub-Koordinator PBP Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (PUSDATARU) Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa berbagai sumber informasi dari internet. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mana memiliki tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data dalam penelitian ini dilaksanakan sesuai peneliti melakukan wawancara dengan informan-informan yang telah disebutkan. Data-data dari berbagai informan tersebut kemudian dipilah, disederhanakan dan selanjutnya dikelompokkan sesuai kebutuhan dan tujuan penelitian agar perhatian penulis dapat ditujukan pada data-data yang dibutuhkan.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini dilaksanakan oleh penulis dengan cara memilih pilihan kata yang tepat dengan menggunakan kalimat efektif dan dengan menyusun paragraf menggunakan pilihan kalimat efektif tersebut sehingga dapat dikembangkan. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah para pembaca pada umumnya untuk memahami hasil penelitian yang akan diungkapkan oleh penulis.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilaksanakan setelah kedua tahap di atas telah selesai. Penulis menarik kesimpulan secara garis besar dengan beralaskan data-data baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Hingga Pelaksanaan Proyek Jalan Oleh PUPR Provinsi Jawa Tengah

Dimulai atas suatu perencanaan itu, mengamati pula pergerakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah demi meraih hasil optimal daripada berbagai jalanan itu. Dengan maksud, adanya berbagai faktor internal maupun eksternal yang menjadi pengaruh besar bagi kondisi Tata Ruang Provinsi: bahan dasar aspal yang tidak stabil pun kurang kokoh; cuaca ekstrem berupa panas maupun hujan, yang kemudian menyebabkan adanya genangan air membendung; perilaku masyarakat dalam berkendara, melawan aturan batas kecepatan hingga kurangnya aspek kehati-hatian di dalamnya; kurangnya anggaran; ataupun alokasi jalan yang kurang efisien (Ray, David. 2003). Melalui alur jalanan yang tidak kunjung dibenahi, menjadi suatu awalan bagi hitungan protes pun keluhan dari masyarakat yang terdampak. Mengingat jalan, menjadikan sarana terpenting sehingga rawan laka apabila tidak didasari dengan suatu perencanaan yang matang dan menyeluruh. Berbagai tantangan ini, kemudian menghasilkan lebih banyak dampak bagi negara hingga masyarakat pada umumnya. Keselamatan, bahkan tuntutan anggaran yang membengkak akibat pembenahan jalan secara terus-menerus. Walaupun, di Indonesia, perbaikan jalan secara rutin dilaksanakan oleh dan kepada Pemerintah Provinsi itu sendiri; diakui, bahwasanya masyarakat tidak sepenuhnya perlu melayangkan laporan agar Pemerintah melirik permasalahan itu. Dengan demikian, dibutuhkan adanya perencanaan yang menyeluruh bagi terpenuhinya fungsi suatu jalanan tersebut. Demi kenyamanan, keamanan, hingga kebersamaan umum.

Perencanaan itu, meninjau akan cuaca hingga perubahan ekstrem yang terjadi dewasa ini menggunakan suatu Dokumen Perencanaan Lingkungan. Di dalamnya, dituang mengenai segala macam identifikasi akan suatu hal apa saja yang diancam terganggu akibat adanya kegiatan pemeliharaan jalan. Kemudian, berlaku peningkatan mutu jalan untuk pelbagai hal mengenai jalanan itu, yang telah terlampaui meliputi prediksi Perencanaan Lingkungan dengan utuh. Dalam segi kebersihan udara, ancaman adanya polusi di antaranya; kebisingan bagi wilayah terdampak; hal-hal terkait kehidupan sosial masyarakat luas; terjaminnya kebersihan air; hingga geologi tanah yang dipastikan stabil; dan lain sebagainya. Sebelum perencanaan yang telah disusun rapi itu agar dilaksanakan, pertama-tama akan diperiksa, diselidiki pula dalam dokumen penyusunan lingkungan itu. Kemudian, akan tertulis di antaranya, bahwa kepastian riset yang terlebih dahulu ditanam secara optimal dan terperinci, supaya risiko terjadinya gagal maupun cacat agar berkurang hingga terminimalisir. Namun, apabila terjadi suatu gangguan fatal daripada perencanaan yang telah disusun dari jauh hari; dalam andaikata ialah cuaca ekstrem maka Pemerintah Provinsi melancarkan suatu inovasi ciptaannya dengan nama GERAAM, Gerakan Anti-Air Menggenang. Oleh solusi itu, mengantisipasi dalam pergerakannya, mengenai banyaknya air yang menggenang di sekitar badan jalan atau ruang milik jalan. Hal ini dinilai efektif dalam mengurangi terjebaknya air yang bisa menyebabkan parahnya kerusakan suatu jalan itu. Suatu gerakan ini, berwujud apabila hujan turun, akan ada petugas milik Pemerintah Provinsi demi memperhatikan kesehatan ruas-ruas jalan yang

terindikasi berisiko itu. Apabila kemudian ditemukan adanya genangan air, akan dengan segera dibentuk suatu aliran, agar air yang terjebak di antara badan jalan itu tidak lagi menggenang hingga terbelenggu. Selanjutnya, apabila suatu jalanan yang rusaknya semakin menjadi, sebelum adanya penanganan oleh petugas Pemerintah Provinsi maka ditunjukkan kepadanya, yaitu: (1) rehabilitasi; (2) peningkatan jalan; dan, (3) rekonstruksi jalan. Ketika suatu jalan itu, dalam perencanaan ialah sesuai dengan penyelesaian rehabilitasi maka kerusakan padanya dapat diidentifikasi akan kondisi menyeluruh. Mengenai spesifikasi rehabilitasi, yang kemudian diusung perencanaan lainnya demi perbaikan itu segera dilaksanakan. Namun, sebelum segala perencanaan daripada rehabilitasi, peningkatan jalan, ataupun rekonstruksi; pun terdahulu diikuti oleh pemeliharaan rutin. Seluruhnya pemeliharaan itu demi mempertahankan jalan tersebut sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya hingga optimal bagi masyarakat luas.

Kemudian, diikuti oleh pengerjaan suatu jalanan raya, pun berfokus kepada beban administrasi seketika masyarakat yang terdampak demi mempelajari proyek Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mengingat kembali, akan upaya pemeliharaan rutin jalanan, dilakukan suatu pemberitahuan terlebih dahulu kepada bagian sosial yang berisiko atas wilayahnya terganggu. Demikian pula, masyarakat dapat berperan aktif oleh suaranya melalui suatu aplikasi milik Pemerintah Provinsi dengan nama 'Jalan Cantik', yang mana sebagai wujud antisipasi andaikala petugas Pemerintah melewati fokus atas suatu jalan yang disisir itu, sehingga bagian masyarakat dapat mengajukan laporan terkait suatu hal itu. Agar dapat dibenahi, dengan penanganan yang segera. Dihias dengan konsultasi publik, bilamana sebelum segala upaya dalam perbaikan jalan itu kepada masyarakat; rehabilitasi, peningkatan jalan, hingga rekonstruksi jalan. Demi menuai respons masyarakat, berupa persetujuan bagi yang terancam akan segala dampak itu. Mengundang masyarakat, tokoh-tokohnya, hingga para pejabatnya. Kemudian, dilakukan komunikasi dua arah yang efektif, guna pihak pembela masyarakat mempelajari bahwa di wilayah perencanaan itu, nantinya akan digarap suatu proyek dengan berbagai runtutannya mendetail. Dimulai sejak tahun berapa, diharap selesai dalam jangka waktu berapa lamanya. Dengan berbekal berita acara, ruang bagi masyarakat menyalurkan saran serta masukan, dan lain sebagainya. Kemudian, apabila suatu proyek itu ialah perencanaan sebuah ruas jalanan baru maka Pemerintah Provinsi akan mengajukan kepadanya identifikasi kebutuhan rute itu, melalui segala rancangan hingga perencanaan yang telah dibentuk sebelumnya. Dengan kebutuhan lahan, apabila kepemilikan atas wilayah itu bukanlah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka akan dilaksanakan upaya pembebasan lahan di atas tanah itu.

Bermula dengan adanya konsultasi publik demi masyarakat, sosialisasi, hingga pemaparan maksud dan tujuan proyek tersebut. Dengan menonjolkan pelbagai manfaat atas bangunan proyek itu kepada masyarakat luas – terutama yang diundang dalam forum sosialisasi itu. Melalui anggapan manfaat kepada masyarakat itu, kemudian Pemerintah Provinsi membuka peluang baginya dalam membentuk suatu POKMAS, yaitu Kelompok Masyarakat. Guna, menunjuk bukti kerelaan masyarakat mengenai proyek itu, pun memikul kerja sama maupun gotongroyong dalam pengerjaannya. Meskipun bukanlah mereka mengerjakan komponen berat di dalamnya, alih-alih upaya yang lebih ringan demi menjaga keasrian lingkungan – sehingga dampak dapat diminimalisir. Melalui upaya itu,

tidak dipungkiri adanya sengketa mengenai pembebasan lahan. Seyogianya, tiada satu pun kebijakan milik Pemerintah yang diterima seluruhnya oleh masyarakat. Berbagai tolgan pantas saja digalngkan, dengan menimbang bahwa di situlah tempat baginya memperoleh pekerjaan maupun tempat tinggal. Penyelesaian yang kerap dipilih oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka ini ialah Ganti-Untung. Di mana, kepemilikan lahan ataupun tanah itu kemudian ditawarkan dengan harga tinggi kepada pemilik. Tidak hanya di atas harga pasar, namun pula melibatkan *appraisal* guna menilai status tanah itu dalam prospek fisik, sosial, dan berbagai hal yang mengikutinya. Apabila tawaran mengenai perolehan hak atas tanah itu pun tidak disetujui, kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan meninjau kembali. Bilamana mungkin, bagi wilayah lahan itu tidaklah dianggap perlu, dengan jalan tengah ataupun penyusunan ulang daripada desain yang dianggap masihlah mampu untuk diwujudkan dan disempurnakan. Disusul berbagai macam upaya persuasif, dengan mendekati upaya-upaya beserta manfaat yang diajukan kepada bagian masyarakat ataupun tokoh-tokoh yang mewakilinya.

Lebih banyak mengenai pendekatan persuasif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan hal pembebasan lahan, selama belum adanya pelanggaran hak-hak personal oleh Pemerintah Provinsi, sejatinya tidak perlu mengais solusi kepada arah litigasi. Adapun pembebasan lahan demi menghindari pelanggaran hak masyarakat itu, Pemerintah Provinsi mengupayakan suatu gerakan berupa Penlok. Yakni, penetapan lokasi yang dibebaskan melalui tim pengadaan tanah, salah satu contohnya ialah BPN. Langkah ini diambil sesaat ketika tanah yang bersungguh diambil alih haknya berupa luas lebih dari 5 hektare. Melalui Penlok, kemudian, senada dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwasanya ketika Penlok dilaksanakan, sebagaimana bagian daripada masyarakat yang tidaklah setuju atas pembebasan lahan itu, selebihnya dapat dititipkan kepada Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri. Demi konsinyasi, adapun beberapa masyarakat terdampak yang masih saja tidak menyetujui, dapat mengajukan suatu gugatan mengenai segala hal pembebasan tanah itu, sehingga langkah ataupun putusan daripada sengketa itu dapat diselesaikan secara adil pun dengan kuasa hukum tetap serta *inkracht*.

2. Respons Hingga Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Menyempurnakan Proyek Jalan serta Mempertahankannya

Dalam suatu beban daripada bagian ini, menggali akan segala kesulitan maupun kerugian bagi masyarakat sekitar yang sejatinya di luar pemahaman dalam sosialisasi yang disetujui. Bahwasanya, segala wujud halangan daripada proyek jalan dalam perbaikan maupun pembangunan, berpeluang mengakibatkan adanya risiko laka lalu lintas, ataupun sekadar macet yang berkepanjangan. Diakui melalui manajemen lalu lintas dapat menyokong permasalahan itu, pun bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (Dishub) maupun Kepolisian supaya tata tertib dalam berkendara masih dalam perhatian, demi keselamatan masyarakat luas yang menggunakannya. Kemudian, untuk rawan laka, berbekal persyaratan khusus untuk geometrik jalan yang telah didesain atas hal itu, menurut pedoman perancangan ialah berpotensi laka atas tidak sempurnanya geometrik jalan (Alinyemen) yang dipertimbangkan. Bukanlah perihal di wilayah jalanan itu cacat

atas pembenahan ataupun pembangunan yang sempurna. Dengan itu, apabila dapat dibuktikan bahwasanya desain yang dicanangkan sebagai fondasi ialah cacat maka Pemerintah Provinsi akan melakukan peninjauan ulang berupa *review design* atas jalanan itu, sehingga dilakukan perbaikan yang mengikuti. Berlandaskan pedoman keselamatan ialah utama dalam perbaikan itu, dengan berbagai upaya, seperti pemasangan rambu dari radius jauh; adanya pemberitahuan; disempurnakannya Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin); pengawasan terhadap pengalihan dan pengaturan lalu lintas. Mengingat, seyogianya, dalam hal perbaikan maupun pembangunan proyek dengan memperhatikan Alinyemen ialah demi kenyamanan seperangkat pengguna jalan. Kemudian, perihal segala tolok ukur kecelakaan atas jalanan itu, ialah sesuai dengan standar Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Sehingga, dinilai oleh KNKT mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adanya laka lalu lintas daripada seperangkat jalan itu, supaya dibenahi demi mewujudkan standar yang diberikan.

Selanjutnya, mengenai pelbagai laporan maupun protes yang dilayangkan oleh masyarakat terdampak mengenai pencemaran suara, kemudian berpotensi menumpuk beban batin ataupun psikologis. Dengan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengenai persepsi masyarakat perihal bising, sepatutnya telah dibendung oleh studi mengenai seberapa luas pun mengganggu atas pencemaran suara itu dalam satuan desibel. Kemudianantisipasi, dengan segala bentuk usaha, berupa penggunaan peredam, hingga waktu pelaksanaan supaya tidak mengganggu ketenangan masyarakat. Namun, apabila telah terlanjur mengganggu, seandainya oleh Pemerintah Provinsi dianggap masih di bawah ambang pencemaran, tapi masyarakat sudah merasa tercemari lingkungannya. Dijelas bahwa selama ini tiada hal serupa dengan permasalahan itu, pun hal-hal mengenai kebisingan dalam pengerjaan proyek jalan dianggap sebagai suatu yang tidak mungkin dihindari. Pasti ada kebisingan itu, pasti ada laporan mengenai hal itu. Adapun mengenai perilaku pengendara yang mengganggu masyarakat di sekitar jalanan itu, dapat dikomunikasikan dengan perhubungan, yang kemudian terlahir suatu kebijakan tersendiri dalam mengatasi masalah itu. Kemudian mengenai laporan-laporan atas hal bising itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merespons melalui berbagai kanal-kanal aduan miliknya. Menimbang masyarakat dewasa ini yang aktif dalam bersuara melalui sosial media, yaitu menghampiri situs aplikasi ‘Lapor Gub’, ‘SP4N LAPOR!’, ‘Jalan Cantik’. Dengan evaluasi mingguan mengenai aduan-aduan itu, menjadikan opini masyarakat yang didengar menjadi baku pembenahan kebijakan di lain waktu.

3. Upaya Preventif Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir di Provinsi Jawa Tengah

Salah satu dari banyaknya hal yang mempengaruhi terjadinya banjir ialah tingginya curah hujan, namun kondisi cuaca saat ini sangatlah sulit untuk diprediksi, mulai dari hari siang yang panas hingga tiba-tiba hujan pada malam hari. Musim hujan saat ini masih terpengaruh oleh *El Nino*. Berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pengertian dari *El Nino* adalah kejadian di mana suhu muka laut memanas melebihi kondisi normal yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur. Memanasnya suhu muka laut ini

menghasilkan melambungnya potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah juga mengurangi curah hujan di wilayah sekitarnya termasuk Indonesia. Pengaruh dari kejadian inilah yang menyebabkan hujan yang seharusnya turun semenjak bulan Oktober menjadi turun pada bulan November. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (PUSDATARU) Provinsi Jawa Tengah sendiri telah mengantisipasi curah hujan tersebut dengan menyediakan beberapa posko banjir semenjak 1 November 2023 hingga 31 Maret 2023. Dari posko banjir tersebut, mereka akan memantau curah hujan juga kondisi tingkat air di sungai guna mengantisipasi risiko bencananya.

Selain itu, Dinas PUSDATARU juga telah menyiapkan berbagai bahan banjir seperti *sand bag*, bronjong juga *geo bag* di titik-titik yang potensi mengalami bencana banjir seperti potensi tanggul jebol, luapan sungai dan segala macam. Kemudian mereka juga memiliki sistem informasi di *android* dengan nama Sistem Pelaporan dan Penanganan Banjir (Si Papa Bro) yang dapat di-*download* di *Google Play Store* agar masyarakat dapat segera melaporkan kondisi terkait banjir, setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti baik secara *online* ataupun secara langsung sesuai dengan kewenangan dan kemampuan mereka. Contohnya ada waduk yang mengalami kerusakan maka mereka akan menganggarkan untuk operasional dan pemeliharannya agar bisa segera diperbaiki. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penanganan darurat, artinya apabila ada anggaran penanganan darurat maka kerusakan tersebut akan segera mereka perbaiki, namun kalau tidak bisa menggunakan anggaran penanganan darurat tersebut maka perbaikan infrastruktur tersebut akan dianggarkan pada tahun selanjutnya (tahun yang akan datang). Tidak hanya sampai situ, melalui aplikasi Si Papa Bro dimas PUSDATARU juga dapat memberikan peringatan dini kepada pengguna aplikasinya terkait dengan bencana banjir sehingga masyarakat yang merupakan pengguna aplikasi Si Papa Bro dapat segera mengevakuasi diri dan juga mengamankan barang berharga milik mereka. Selain itu *CCTV* di berbagai titik kontrol poin juga selalu aktif guna mengawasi berbagai lokasi yang berpotensi terjadi banjir serta mereka selalu menyiagakan *mobile pump*. *Mobile pump* adalah pompa-pompa yang digendong di truk seperti yang ada di sekitar lokasi dinas dan juga di enam lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) mereka bisa *mobile*-kan atau mereka *drop* di daerah yang berpotensi banjir untuk menyedot air dan membuang air. Di samping itu juga telah disediakan pompa-pompa *portable* yang kapasitasnya lebih kecil.

4. Upaya Pemerintah dalam Pengendalian Banjir di Provinsi Jawa Tengah

Pengendalian banjir sendiri tidak dapat dilakukan semata-mata oleh pemerintah saja, namun harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak dengan menggunakan konsep *pentahelix* yang artinya melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha (badan maupun pelaku usaha), media juga akademisi. Kemudian untuk pengendalian banjir pada beberapa infrastruktur seperti waduk dan embung baik yang dibangun oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah (kabupaten/kota) telah disiagakan petugas operasional dan pemeliharaan (OP). Selain kedua infrastruktur itu juga ada cekdam

yang mana merupakan bangunan yang dibangun di sekitar sungai guna menstabilkan dasar sungai. Cekdam sendiri tidak membutuhkan operasional dan pemeliharaan layaknya waduk dan embung sehingga tidak ada petugas OP. Selanjutnya mengenai keterlibatan masyarakat, pada setiap tahap perencanaan pembangunan infrastruktur selalu diadakan sosialisasi di mana Dinas PUSDATARU menekankan bahwa masyarakat wajib untuk berperan serta menjaga kelestarian bangunan yang dengan kata lain jangan sampai bangunan yang dibangun menjadi rusak kemudian juga tentang pengelolaan sampahnya di sana. Jangan sampai waduk, embung dan segala infrastruktur yang dibangun menjadi tempat sampah.

Kemudian pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) telatnya pada tingkat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) rutin mengadakan Pertemuan Partisipasi Masyarakat (PPM) guna memberikan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana cara untuk melakukan atau membantu OP dari bangunan-bangunan. Lebih lanjut mengenai sosialisasi, sosialisasi dilakukan demi memberitahu masyarakat setempat lokasi pembangunan bahwa akan dibangun suatu infrastruktur di suatu titik lokasi, apa manfaat pembangunan infrastruktur tersebut juga bagaimana membantu petugas OP yang akan disiagakan. Selanjutnya pada tahap perencanaan tidak selalu berjalan lancar, begitu pula pada tahap perencanaan pembangunan infrastruktur ini juga tidak selalu berjalan lancar. Terkadang ada konflik berupa penolakan dari masyarakat seperti pada pembangunan waduk bodri, waduk bantarkawung juga di sungai pemali itu saat sosialisasi perencanaan beberapa kali mendapatkan penolakan. Solusi dari dinas tersebut ialah infrastruktur dibangun sesuai kebutuhan, artinya dapat disimpulkan bahwasanya apabila masyarakat menolak maka mereka akan mencari lokasi (*site*) yang lain karena mereka tidak mau berbenturan dengan masyarakat. Karena masih pada tahap perencanaan maka akan dicari *site* lain di mana masyarakatnya lebih kondusif.

Selanjutnya pada konsep *pentahelix*, peran dunia usaha (badan maupun pelaku usaha) ialah sebagai penyedia yang membantu menjangkau tujuan sehingga menghasilkan nilai *plus* juga sekaligus mempertahankan perkembangan berkelanjutan. Dalam konsep ini, badan maupun pelaku usaha dapat berfungsi dalam menghadirkan teknologi juga membantu dalam bentuk modal untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian media juga merupakan salah satu pihak penting dalam pembangunan dan pelestarian juga perawatan infrastruktur, tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya media sangat berpengaruh pada kalangan masyarakat manapun. Media dapat membantu menyebarkan informasi apapun tak terkecuali informasi mengenai pembangunan infrastruktur, pelestarian juga perawatan infrastruktur yang ada. Dalam tahap pembangunan media dapat menyebarkan informasi mengenai pembangunan tersebut sehingga masyarakat yang terdampak maupun tidak terdampak akan mengetahui bahkan dapat menarik perhatian badan ataupun pelaku bisnis yang ingin membantu pembangunan infrastruktur. Selanjutnya media juga berperan penting bagi pelestarian infrastruktur karena media dapat menyebarkan informasi mengenai seberapa pentingnya infrastruktur terkait sumber daya air seperti waduk, embung maupun cekdam sehingga tidak hanya masyarakat setempat saja yang menjaga dan melestarikan tapi begitu pula dengan masyarakat dari daerah lain.

Lebih lanjut mengenai salah satu pihak dalam konsep *pentahelix* yaitu akademisi, pada awal tahap proses pembangunan akan dilakukan suatu proses studi terlebih dahulu yang kemudian akan memunculkan *Detail Engineering Design* (DED). DED berisikan aspek fungsional yang mana didalamnya ada pendekatan pelaku kegiatan di lapangan, kebutuhan dan fungsi ruang serta jenis kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian aspek teknis yang menjelaskan tentang konsep sistem struktur dan sistem konstruksi yang nantinya dikembangkan di lapangan. Ketiga, Aspek kinerja (utilitas) dimana didalamnya berisi penjelasan tentang jaringan air bersih, pemadam kebakaran, konsep pencahayaan, jaringan listrik, penghawaan, jaringan komunikasi, jaringan air kotor, penangkal petir, pembuangan sampah, pengolahan limbah dan jaringan transportasi yang dianggap sesuai dan mendukung jika bangunan nantinya sudah berdiri dan dapat digunakan. Dan terakhir adalah aspek arsitektural dimana dijabarkan telaah mengenai penataan ruang, bentuk dan penampilan bangunan juga penekanan desain yang nantinya dikembangkan.

Apabila saat tahap DED sudah ada penolakan dari masyarakat atau masyarakat sudah merasa terganggu, maka Dinas PUSDATARU akan mencari *site* lain yang lebih kondusif. Pada intinya apabila masyarakat menolak maka infrastruktur tidak dibutuhkan di area tersebut, disitulah mereka akan mencari *site* lain yang lebih membutuhkan. Lebih lanjut mengenai detail dokumen pembangunan, selain DED adapula dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang mana didalam dokumen tersebut dijabarkan alternatif-alternatif yang harus dilakukan apabila saat konstruksi ada efek-efek negatif seperti polusi udara.. Penyedia jasa harus sudah memiliki alternatif didalam dokumen perencanaan, dokumen amdalnya, dokumen lingkungan. Kedua, apabila saat proses konstruksi ada hal-hal negatif terkait lingkungan maka yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan diskusi bersama, baik dari masyarakat, penyedia jasa serta kontraktornya bagaimana akan mengurangi efek negatif pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan.

KESIMPULAN

Berangkat dari teori beban-beban administratif berupa: *Learning Cost*, *Psychological Cost*, dan *Compliance Cost*; dalam proyek Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah PUPR, telah dirancang sedemikian rupa demi menghindari ataupun meminimalisir segala beban itu. Dimulai dari tahapan perencanaan, perancangan, pelaksanaan, hingga pemecahan masalah. Di mana hal-hal tersebut terus-menerus memperhatikan kenyamanan hidup dan kesejahteraan abadi masyarakat luas, sehingga hal atas beban yang dikeluhkan dapat menuai solusi. Berlandaskan Undang-Undang, penilaian, standar yang dipenuhi, sehingga seluruhnya dapat menyokong keberhasilan proyek milik Pemerintah Provinsi dalam berlangsung sukses untuk kepentingan bersama.

Salah satu dari banyaknya hal yang mempengaruhi terjadinya banjir ialah tingginya curah hujan, namun kondisi cuaca saat ini sangatlah sulit untuk diprediksi, mulai dari hari siang yang panas hingga tiba-tiba hujan pada malam hari. Musim hujan saat ini masih terpengaruh oleh *El Nino*. Pengaruh dari *El Nino* inilah yang menyebabkan hujan yang seharusnya turun semenjak bulan Oktober menjadi turun pada bulan November. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan

Penataan Ruang (PUSDATARU) Provinsi Jawa Tengah sendiri telah mengantisipasi curah hujan tersebut dengan menyediakan beberapa posko banjir semenjak 1 November 2023 hingga 31 Maret 2023. Selain itu, Dinas PUSDATARU juga telah menyiapkan berbagai bahan banjir seperti *sand bag*, bronjong juga *geo bag* di titik-titik yang potensi mengalami bencana banjir seperti potensi tanggul jebol, luapan sungai dan segala macam. Kemudian mereka juga memiliki sistem informasi di *android* dengan nama Sistem Pelaporan dan Penanganan Banjir (Si Papa Bro). Pengendalian banjir sendiri tidak dapat dilakukan semata-mata oleh pemerintah saja, namun harus dilakukan secara komperhensif dan melibatkan berbagai pihak dengan menggunakan konsep *pentahelix* yang artinya melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha (badan maupun pelaku usaha), media juga akademisi. Kemudian apabila masyarakat menolak maka infrastruktur tidak dibutuhkan di area tersebut, disitulah mereka akan mencari *site* lain yang lebih membutuhkan. Selanjutnya mengenai detail dokumen pembangunan, selain DED adapula dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang mana di dalam dokumen tersebut dijabarkan alternatif-alternatif yang harus dilakukan apabila saat konstruksi ada efek-efek negatif seperti polusi udara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Herd, P., & Moynihan, D. P. (2018). *Administrative Burden: Policymaking by Other Means*. Russell Sage Foundation.

Jurnal

Ray, David. (2003). Jaringan Jalan Daerah yang Rusak di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Journal of Prakarsa Infrastruktur Indonesia*, Edisi 14 Juli 2003. pp. 4-9.

Rahardjo, H.A., Dinariana, D., Suryani, F., (2015). The effective strategy in the management of “pantura” lane road. *Java - Indonesia. Procedia Eng.* 125, 541–546.

Poerwandari, E. K. (1998). Pendekatan kualitatif dalam penelitian psikologi. Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2.

Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Rosda Karyaq.

Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Website

<https://pemimpin.id/gagasan-kenapa-sih-kita-harus-memaksimalkan-pentahelix/>
<https://www.rumah.com/panduan-properti/ded-adalah-82017>